

Indonesia's Digital Resilience through the Implementation of the Four Pillars of Aswaja Ethics for Cyber Harmony

Ketahanan Digital Indonesia Melalui Implementasi Empat Pilar Etika Aswaja untuk Harmoni Siber

Fathul Fahmi

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Fathul Fahmi

✉ fathulfahmi21@mhs.ptiq.ac.id

Keyword:

Aswaja Cyber Ethics; Digital Resilience; Digital Literacy; Cyber Polarization; Nahdlatul Ulama.

Kata Kunci:

Etika Siber Aswaja; Ketahanan Digital; Literasi Digital; Polarisasi Siber; Nahdlatul Ulama.

Abstract

Indonesia faces a digital paradox: rapid internet penetration drives high connectivity while accelerating an infodemic that threatens social cohesion. This study proposes a "Aswaja Cyber Ethics" framework operationalizing four pillars of Ahlussunnah wal Jamaah Tawassuth (moderation), Tasamuh (tolerance), Tawazun (balance), and I'tidal (justice/steadfastness) as an ethical foundation to bolster digital resilience and cyber harmony. A descriptive qualitative method with a case study of Nahdlatul Ulama (NU) implementation reveals that integrating Aswaja principles into digital content can mitigate algorithmic polarization, reduce hate speech, manage digital fatigue, and foster critical literacy through tabayyun practices. Analysis indicates that NU's culturally resonant and proactive narratives, including social media format adaptation, have the potential to enhance ethical digital literacy effectiveness. However, challenges of disinformation industry scale, algorithmic backlash, and internal diversity present structural barriers. This paper recommends cross-stakeholder collaboration to integrate Aswaja Cyber Ethics into national digital literacy policies and curricula.

Abstrak

Indonesia menghadapi paradoks digital: kemajuan penetrasi internet mendorong konektivitas tinggi sekaligus mempercepat infodemik yang mengancam kohesi sosial. Penelitian ini mengusulkan kerangka "Etika Siber Aswaja" yang mengoperasionalkan empat pilar Ahlussunnah wal Jamaah Tawassuth (moderasi), Tasamuh (toleransi), Tawazun (keseimbangan), dan I'tidal (keadilan/keteguhan) sebagai landasan etis untuk memperkuat ketahanan digital dan harmoni siber. Metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus implementasi di Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan bahwa integrasi prinsip Aswaja ke dalam konten digital dapat menahan polarisasi algoritmik, mengurangi ujaran kebencian, mengelola kelelahan digital, serta mendorong literasi kritis melalui praktik tabayyun. Hasil analisis mengindikasikan bahwa resonansi kultural dan narasi proaktif NU, termasuk adaptasi format media sosial, berpotensi meningkatkan efektivitas literasi digital berbasis etika. Namun, tantangan industri disinformasi, arus balik algoritmik, dan keragaman internal menjadi hambatan struktural. Artikel ini merekomendasikan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan Etika Siber Aswaja ke dalam kebijakan dan kurikulum literasi digital nasional.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Republik Indonesia saat ini tengah berada dalam cengkeraman sebuah paradoks digital yang mendalam. Dalam dua dekade terakhir, negara ini telah mengalami lompatan teknologi yang luar biasa, mengubah dirinya menjadi salah satu masyarakat paling terhubung secara digital di dunia. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet telah mencapai 79,5%, setara dengan 221,5 juta jiwa pengguna [1]. Angka ini bukan sekadar statistik; ia merepresentasikan perubahan fundamental dalam struktur komunikasi, ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat Indonesia.

Secara demografis, lanskap digital ini didominasi oleh generasi muda. Generasi Z (kelahiran 1997-2012) dan Milenial (kelahiran 1981-1996) merupakan kelompok pengguna internet terbesar, dengan tingkat penetrasi masing-masing mencapai 87,80% dan 89,12% [2]. Aktivitas utama mereka di ruang siber adalah mengakses media sosial, yang menjadi alasan utama bagi 24,80% masyarakat untuk terhubung ke internet [2]. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) telah berevolusi dari sekadar alat komunikasi menjadi arena utama bagi pembentukan identitas, diskursus publik, dan mobilisasi sosial [3].

Namun, di balik fasad konektivitas yang mengesankan ini, tersembunyi sisi gelap yang mengancam fondasi kohesi sosial bangsa. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi telah melahirkan ekosistem yang rentan terhadap manipulasi, polarisasi, dan konflik. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengalami revolusi digital, tetapi juga krisis informasi yang akut. Paradoksnya adalah: teknologi yang dirancang untuk menghubungkan justru menjadi instrumen yang ampuh untuk memecah belah.

Ancaman ini lebih dari sekadar "berita bohong" atau "hoaks" yang bersifat sporadis. Apa yang dihadapi Indonesia adalah sebuah "infodemik" sebuah epidemi informasi yang berlebihan, termasuk misinformasi (informasi salah yang disebar tanpa niat jahat) dan disinformasi (informasi salah yang sengaja dibuat dan disebar untuk menipu atau menyebabkan kerugian), yang secara sistematis mengikis kepercayaan publik, merusak diskursus sipil, dan mengancam ketahanan nasional [4].

Skala masalah ini terdokumentasi dengan baik. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia melukiskan gambaran yang suram. Antara

Agustus 2018 hingga Mei 2023, tim AIS (*Automatic Identification System*) kementerian telah mengidentifikasi tidak kurang dari 11.642 konten hoaks yang beredar di platform digital. Kategori hoaks yang paling dominan mencakup isu-isu yang sangat sensitif dan berdampak luas: kesehatan (2.287 item), pemerintahan (2.111 item), penipuan (1.938 item), dan politik (1.373 item) [5].

Kerentanan ini menjadi sangat nyata selama periode kontestasi politik. Pemilihan Umum 2024, misalnya, menyaksikan lonjakan tajam dalam penyebaran disinformasi yang menargetkan para kandidat dan institusi pemilu. Pada Januari 2024 saja, Kominfo melaporkan telah menangani 2.882 konten disinformasi terkait pemilu yang tersebar di berbagai platform. Disinformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempengaruhi preferensi pemilih, tetapi juga untuk mendelegitimasi proses demokrasi itu sendiri, menciptakan ketidakpercayaan, dan memicu fragmentasi sosial [6].

Dampak infodemik tidak terbatas pada ruang virtual. Ia memiliki kapasitas nyata untuk mengubah ketegangan sosial yang laten menjadi konflik terbuka. Media sosial, dengan algoritmanya yang cenderung memprioritaskan konten sensasional dan emosional, berfungsi sebagai akselerator konflik [4]. Studi Triantoro (2019) telah menunjukkan bagaimana platform ini menjadi vektor utama penyebaran narasi yang memecah belah, terutama yang berkaitan dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Kesalahpahaman, ujaran kebencian, dan *cyberbullying* yang terjadi di ruang virtual dapat dengan cepat meluap ke dunia nyata, merusak hubungan antar-komunitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun [7].

Fenomena polarisasi politik adalah contoh paling gamblang dari dinamika ini. Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 meninggalkan luka yang dalam pada lanskap sosial-politik Indonesia, menciptakan pembelahan yang tajam antara kelompok yang diidentifikasi sebagai "nasionalis" dan "Islamist" [8]. Polarisasi ini tidak terjadi secara alami; ia diperkuat dan dieksploitasi secara masif melalui media sosial. Algoritma menciptakan "ruang gema" (*echo chambers*) dan "gelembung filter" (*filter bubbles*) yang mengisolasi pengguna dari pandangan yang berlawanan, memperkuat keyakinan yang sudah ada, dan menumbuhkan permusuhan terhadap "kelompok lain" [9]. Akibatnya, dialog konstruktif menjadi hampir mustahil, digantikan oleh siklus saling tuduh dan delegitimasi.

Sebuah dinamika yang sangat mengkhawatirkan muncul dari persimpangan antara demografi pengguna dan kerentanan terhadap disinformasi. Data menunjukkan adanya

sebuah "lingkaran kerentanan generasional". Di satu sisi, Generasi Z dan Milenial adalah demografi yang paling jenuh secara digital, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di ruang siber. Di sisi lain, berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa populasi yang lebih muda, khususnya remaja akhir hingga awal dua puluhan, menunjukkan kerentanan yang signifikan terhadap disinformasi, sebagian besar disebabkan oleh keterampilan literasi media yang belum berkembang sepenuhnya. Pada saat yang sama, organisasi keagamaan tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU) secara spesifik menargetkan demografi yang sama ini dengan strategi dakwah digital yang dimodernisasi, termasuk mengintegrasikan penceramah populer dari gerakan "hijrah" untuk meningkatkan daya tarik mereka [10].

Ini bukanlah tren yang terpisah, melainkan bagian-bagian yang saling berhubungan dari sebuah sistem yang dinamis. Kerentanan kaum muda menciptakan kekosongan pengaruh yang coba diisi oleh berbagai aktor, baik penyebar disinformasi maupun otoritas keagamaan tradisional. Hal ini menciptakan sebuah "medan pertempuran pengaruh" yang berisiko tinggi, yang diperebutkan terutama di arena digital, untuk menentukan masa depan generasi Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan jangkauan digital NU, oleh karena itu, akan memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap lintasan sosial dan politik jangka panjang negara ini.

Menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat sipil telah menggagas berbagai program literasi digital. Inisiatif-inisiatif ini, meskipun penting, seringkali mengandalkan kerangka kerja teknis dan sekuler yang berfokus pada "cara mengidentifikasi hoaks". Namun, pendekatan semacam ini seringkali gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu kurangnya landasan etis dan moral dalam berinteraksi di dunia digital.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan argumen akan perlunya sebuah kerangka etika yang memiliki resonansi kultural dan religius yang mendalam. Tesis utamanya adalah bahwa empat pilar *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) *Tawassuth* (moderasi), *Tasamuh* (toleransi), *Tawazun* (keseimbangan), dan *I'tidal* (keadilan/keteguhan) yang tertanam kuat dalam tradisi Islam Indonesia, menyediakan sebuah *manhaj al-fikr* (metodologi berpikir) yang komprehensif dan cangguh. Metodologi ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai model "Etika Siber Aswaja" untuk membangun ketahanan individu dan kolektif terhadap infodemik digital, dan dengan demikian, menjaga serta memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian tentang implementasi Empat Pilar Etika Aswaja dalam membangun ketahanan digital dan harmoni siber di Indonesia, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik infodemik digital di Indonesia serta faktor-faktor yang memicu meluasnya hoaks dan disinformasi di kalangan Generasi Milenial dan Z?
- b. Sejauh mana penerapan prinsip *Tawassuth* (moderasi) dapat menahan laju polarisasi dan ekstremisme algoritmik dalam konsumsi konten media sosial?
- c. Bagaimana prinsip *Tasamuh* (toleransi) dapat diwujudkan dalam interaksi daring untuk mengurangi ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan menciptakan dialog sipil yang konstruktif?
- d. Dalam konteks *digital wellbeing*, sejauh mana penerapan prinsip *Tawazun* (keseimbangan) membantu individu mengelola kelelahan digital, menjaga interaksi seimbang antara daring–luring, serta meningkatkan kualitas hidup?
- e. Bagaimana implementasi prinsip *I'tidal* (keadilan & keteguhan) memperkuat literasi digital kritis melalui kebiasaan *tabayyun* dan verifikasi informasi, sehingga mencegah penyebaran disinformasi?
- f. Apa saja tantangan struktural, teknis, dan kultural yang dihadapi dalam operasionalisasi kerangka “Etika Siber Aswaja” oleh Nahdlatul Ulama dan pemangku kepentingan lain di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus pada implementasi Empat Pilar Etika Aswaja dalam memperkuat ketahanan digital Indonesia. Data dikumpulkan melalui dokumentasi literatur akademik dan kebijakan, observasi partisipatif pada platform digital resmi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, analisis konten diterapkan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *Tawassuth*, *Tasamuh*, *Tawazun*, dan *I'tidal* diartikulasikan dan dioperasionalkan dalam materi dakwah online, infografis, serta interaksi komunitas daring. Proses triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas temuan, melibatkan perbandingan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen tertulis. Hasil penelitian diinterpretasikan melalui kerangka analisis tematik, yang menelaah hambatan dan

keberhasilan implementasi etika siber Aswaja, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemangku Kepentingan dalam meningkatkan literasi digital berbasis nilai keagamaan.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Konseptual: Dekonstruksi Empat Pilar Aswaja untuk Etika Siber

a. *Tawassuth* (Moderasi): Antidot terhadap Ekstremisme Algoritmik

Tawassuth secara harfiah berarti "mengambil jalan tengah". Ini adalah prinsip fundamental dalam Aswaja yang menolak segala bentuk ekstremisme (*tatharruf*), baik ekstremisme kanan (liberalisme berlebihan) maupun ekstremisme kiri (fundamentalisme kaku). Prinsip ini berakar kuat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat yang adil dan pilihan atau pertengahan), untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia (Q.S. Al-Baqarah: 143). *Tawassuth* bukanlah sikap kompromistis yang lembek, melainkan sebuah posisi prinsipil yang didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan.

Dalam konteks digital modern, *Tawassuth* berfungsi sebagai penangkal kognitif dan perilaku yang sangat relevan terhadap fenomena "ekstremisme algoritmik". Platform media sosial dirancang bukan untuk mencerahkan, melainkan untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*). Algoritma yang mendasarinya belajar dari perilaku pengguna dan cenderung menyajikan konten yang paling mungkin memicu reaksi emosional, yang seringkali adalah konten yang bersifat sensasional, provokatif, dan polarisasi [4]. Hal ini menciptakan "lubang kelinci" (*rabbit holes*) yang dapat menarik pengguna, secara bertahap, ke arah pandangan yang semakin ekstrem, karena platform terus-menerus menyuapi mereka dengan konten yang mengkonfirmasi bias mereka yang sudah ada. Mempraktikkan *Tawassuth* di ruang siber berarti secara sadar melawan logika algoritma ini. Ini melibatkan serangkaian tindakan proaktif:

- 1) **Perlawanan Kognitif:** Mengembangkan kesadaran diri untuk mengenali kapan seseorang sedang ditarik ke dalam ruang gema. Ini berarti menolak dorongan untuk terus mengonsumsi konten yang hanya membuat marah atau memvalidasi pandangan sendiri secara berlebihan.
- 2) **Diversifikasi Konsumsi Informasi:** Secara aktif mencari dan mengikuti

sumber-sumber informasi dari berbagai spektrum ideologis, bahkan yang bertentangan dengan pandangan pribadi. Ini adalah upaya sadar untuk "merusak" profil algoritma yang telah dibangun oleh platform, memaksa platform untuk menyajikan pandangan yang lebih beragam.

- 3) Kultivasi Disposisi Moderat: Membangun sikap batin yang tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kemarahan atau euforia sesaat yang direkayasa oleh platform. Ini adalah tentang menjaga ketenangan dan kejernihan berpikir di tengah badai informasi yang dirancang untuk memprovokasi.

b. *Tasamuh* (Toleransi): Landasan Dialog Sipil di Ruang Publik Virtual

Tasamuh adalah prinsip toleransi, yang didefinisikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam masalah keagamaan (terutama yang bersifat *furu'iyah* atau cabang) maupun dalam isu-isu sosial dan budaya. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang melarang saling mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar yang buruk (Q.S. Al-Hujurat: 11, bukan 13 seperti yang terkadang dikutip), serta menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan damai. *Tasamuh* mengakui keberagaman sebagai sebuah keniscayaan (*sunnatullah*) dan memandangnya sebagai sumber kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan.

Tasamuh menyediakan landasan etis yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi di lingkungan yang seringkali beracun seperti kolom komentar, forum daring, dan grup diskusi. Sifat anonimitas atau semi-anonimitas dan jarak fisik dalam komunikasi digital dapat menyebabkan "efek disinhibisi daring" (*online disinhibition effect*), di mana individu merasa lebih bebas untuk mengungkapkan agresi, ujaran kebencian, dan melakukan *cyberbullying* perilaku yang mungkin tidak akan mereka lakukan dalam interaksi tatap muka [7]. Menerapkan *Tasamuh* di dunia digital berarti:

- 1) Menjaga *Adab* dalam Berdebat: Berkomitmen untuk menjaga etika (*adab*) dalam berkomunikasi. Ini berarti fokus pada substansi argumen daripada menyerang pribadi (*ad hominem*), menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan, dan mengakui validitas parsial dalam argumen lawan jika ada.
- 2) Prinsip Kemanusiaan Digital: Secara sadar mengingat bahwa di balik

setiap nama pengguna dan avatar terdapat seorang manusia dengan perasaan, pengalaman, dan martabat yang sama. Praktik sederhana seperti membaca ulang komentar sebelum mengirimkannya untuk memastikan tidak ada nada yang menghina dapat menjadi implementasi langsung dari prinsip ini.

- 3) Menolak Amplifikasi Kebencian: Secara aktif menolak untuk menyebarkan, membagikan, atau bahkan "menyukai" konten yang merendahkan, membuat stereotip, atau menghina kelompok lain. Ini adalah tindakan etis untuk memutus rantai penyebaran kebencian dan konflik di ruang siber.

c. *Tawazun* (Keseimbangan): Menuju Kesejahteraan Digital (*Digital Wellbeing*)

Tawazun adalah prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Aswaja mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan ukhrawi, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara aspek spiritual dan material. *Tawazun* menolak pandangan yang berat sebelah, seperti materialisme yang mengabaikan spiritualitas, atau spiritualisme yang menolak kehidupan dunia. Ini adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan semua dimensi kemanusiaan.

Tawazun secara langsung menjawab tantangan modern yang dikenal sebagai "kesejahteraan digital" (*digital wellbeing*). Arus informasi yang tak henti-hentinya, notifikasi yang konstan, budaya perbandingan sosial di media sosial, dan tekanan untuk selalu terhubung (*always on*) dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan kelelahan digital (*digital burnout*) [11]. Mempraktikkan *Tawazun* dalam kehidupan digital mencakup tiga dimensi utama:

- 1) Keseimbangan Konsumsi Informasi: Ini adalah tentang menjadi konsumen informasi yang sadar dan kritis, bukan sekadar penerima pasif. Ini berarti menyeimbangkan konsumsi konten hiburan atau remeh dengan konten yang mendidik, bermanfaat, dan memperkaya jiwa. Ini juga berarti mengenali kapan harus berhenti mengonsumsi informasi, terutama berita negatif yang dapat menyebabkan kecemasan.
- 2) Keseimbangan Partisipasi Daring dan Luring: Menjaga keseimbangan

antara kehidupan di dunia maya dan dunia nyata. Meskipun aktivisme daring atau interaksi sosial digital memiliki tempatnya, *Tawazun* mengingatkan bahwa hal itu tidak boleh menggantikan tanggung jawab dan hubungan di dunia nyata, seperti interaksi dengan keluarga, partisipasi dalam komunitas lokal, dan pemenuhan kewajiban profesional atau akademis.

- 3) Keseimbangan Diri dan Teknologi: Secara proaktif mengelola hubungan dengan perangkat digital. Ini dapat mencakup praktik-praktik seperti mengatur waktu layar (*screen time*), mematikan notifikasi yang tidak penting, dan secara berkala melakukan "detoks digital" untuk memberikan ruang bagi refleksi, ibadah, dan pemulihan mental. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat yang melayani manusia, bukan tuan yang memperbudaknya.

d. *I'tidal* (Keadilan & Keteguhan): Fondasi Literasi Digital Kritis

I'tidal berarti tegak lurus, adil, dan proporsional. Ini adalah prinsip untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan berlaku adil dalam segala situasi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan orang beriman untuk menjadi penegak keadilan, bahkan jika itu bertentangan dengan diri sendiri, dan jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum membuat seseorang berlaku tidak adil (Q.S. Al-Maidah: 8). Dalam Aswaja, *I'tidal* juga berarti keteguhan (*istiqamah*) dalam memegang prinsip kebenaran dan keadilan, bahkan di hadapan tekanan, provokasi, atau kesulitan [12].

I'tidal adalah pilar yang menjadi landasan bagi literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab. Di tengah ekosistem informasi yang dipenuhi disinformasi, misinformasi, dan propaganda, *I'tidal* menuntut pendekatan yang aktif dan adil terhadap informasi. Ia adalah imperatif etis di balik praktik Islam klasik *tabayyun* (klarifikasi atau verifikasi). Menerapkan *I'tidal* di ruang siber berarti:

- 1) Keadilan Informasi (*Tabayyun*): Menjadikan verifikasi sebagai kebiasaan digital yang fundamental. Prinsipnya adalah tidak mempercayai atau membagikan informasi apa pun, terutama yang bersifat sensasional atau provokatif, sebelum memverifikasi kebenarannya dari sumber yang kredibel. Ini bukan sekadar tindakan teknis, tetapi sebuah kewajiban moral untuk mencegah penyebaran fitnah (*fitnah*), desas-desus

(*namimah*), dan kebohongan yang dapat merugikan individu atau kelompok lain. Kerangka "THINK" (*True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind*) yang disarankan oleh beberapa aktivis literasi digital adalah aplikasi praktis dari prinsip *I'tidal* ini.

- 2) Keteguhan Menghadapi Provokasi: Secara sadar menolak untuk terpancing oleh "umpan kemarahan" (*rage bait*) atau konten yang sengaja dirancang untuk memicu reaksi emosional dan memecah belah. *I'tidal* menuntut pengendalian diri (*hilm*) dan keteguhan hati untuk tidak membalas provokasi dengan provokasi, melainkan merespons dengan argumen yang rasional, data yang valid, dan kebijaksanaan (*hikmah*).
- 3) Berpihak pada Kebenaran dan Keadilan: *I'tidal* bukan berarti netralitas yang pasif. Ketika dihadapkan pada ketidakadilan atau kebohongan yang nyata di ruang siber (misalnya, kampanye disinformasi yang menargetkan kelompok minoritas), *I'tidal* menuntut sikap proaktif untuk membela kebenaran. Ini bisa berupa tindakan mempromosikan informasi yang faktual, melaporkan konten yang berbahaya, atau mendukung narasi tandingan yang mempromosikan keadilan dan kemanusiaan.

2. Aswaja sebagai Terapi Kognitif-Perilaku untuk Kehidupan Digital

Jika dianalisis lebih dalam, keempat pilar ini, ketika diterapkan secara terpadu di ranah digital, berfungsi lebih dari sekadar seperangkat aturan etis. Mereka beroperasi sebagai sebuah sistem yang mirip dengan "terapi kognitif-perilaku" (*Cognitive-Behavioral Therapy* atau CBT) yang dirancang untuk melatih kembali pikiran (kognitif) dan tindakan (perilaku) individu agar dapat bertahan dan berkembang dalam arsitektur lingkungan digital yang seringkali manipulatif secara psikologis. Masalah-masalah di dunia digital tidak hanya bersifat informasional, tetapi juga psikologis, seperti kecanduan, kecemasan akibat perbandingan sosial, pemicu emosional, dan bias kognitif yang diperkuat oleh algoritma [4].

Pendekatan CBT bekerja dengan mengidentifikasi dan menantang pikiran yang terdistorsi, mengembangkan strategi penanganan, dan memodifikasi perilaku. Kerangka Aswaja dapat dipetakan ke dalam model ini:

- a. *Tawassuth* secara langsung menantang distorsi kognitif "pemikiran hitam-putih" atau keyakinan bahwa "hanya pihak saya yang benar" dengan memaksa

individu untuk terpapar pada pandangan yang berbeda dan mencari jalan tengah yang bernuansa.

- b. *Tasamuh* menyediakan skrip perilaku untuk merespons agresi daring. Alih-alih merespons dengan agresi balasan (sebuah perilaku yang dipelajari), ia mengajarkan de-eskalasi dan dialog sipil sebagai respons alternatif.
- c. *Tawazun* berfungsi sebagai intervensi perilaku langsung untuk mengelola masalah seperti penggunaan gawai yang berlebihan dan konsumsi informasi yang kompulsif, mirip dengan teknik CBT untuk menetapkan batasan yang sehat.
- d. *I'tidal*, melalui praktik *tabayyun*, menanamkan sebuah rutinitas kognitif—sebuah daftar periksa mental yang harus dijalankan sebelum mempercayai atau membagikan informasi, yang secara efektif mengganggu respons impulsif untuk menyebarkan hoaks.

Dengan demikian, kerangka Aswaja dapat dipahami sebagai sistem pra-modern yang berlandaskan spiritual, namun secara fungsional bertindak sebagai perangkat psikologis modern yang mengejutkan. Nilainya tidak hanya terletak pada panduan moralnya, tetapi juga pada utilitas praktisnya dalam menumbuhkan ketahanan mental dan spiritual dalam lingkungan digital yang seringkali tidak ramah.

Tabel 1. Kerangka Kerja Operasional untuk Etika Siber Aswaja

Pilar & Landasan Qur'ani	Patologi Digital yang Ditangani	Pedoman Etis yang Dapat Ditindaklanjuti
Tawassuth (Moderasi) (Q.S. Al-Baqarah: 143)	Ekstremisme Algoritmik & Ruang Gema	Secara aktif diversifikasikan linimasa media sosial Anda. Sengaja ikuti akun dan sumber dengan sudut pandang yang berbeda untuk menciptakan "diet informasi" yang seimbang.
Tasamuh (Toleransi) (Q.S. Al-Hujurat: 11)	Ketidaksopanan Daring & Ujaran Kebencian	Sebelum membalas dengan amarah, terapkan "prinsip kemanusiaan": baca ulang komentar dan ingatkan diri sendiri ada manusia di sisi lain. Tanggapi argumennya, bukan orangnya.
Tawazun (Keseimbangan) (Q.S. Al-Hadid: 25)	Kelebihan Informasi & Kelelahan Digital	Jadwalkan "sabat digital" atau jam bebas teknologi setiap hari. Seimbangkan interaksi sosial daring

dengan keterlibatan komunitas tatap muka di dunia nyata.

I'tidal (Keadilan & Keteguhan) (Q.S. Al-Maidah: 8)	Disinformasi & Provokasi Emosional	&	Terapkan "aturan tiga sumber": jangan pernah membagikan berita sensasional sampai dikonfirmasi oleh setidaknya tiga sumber independen yang kredibel. Jadikan <i>tabayyun</i> sebagai kebiasaan digital inti.
--	------------------------------------	---	--

3. Implementasi dan Studi Kasus: Modernisasi Dakwah Nahdlatul Ulama di Era Milenial

Analisis konseptual mengenai potensi pilar-pilar Aswaja sebagai kerangka etika siber akan menjadi teoretis semata tanpa bukti implementasi di dunia nyata. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi pengusung utama Aswaja di Indonesia, menyediakan studi kasus yang kaya dan relevan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diupayakan untuk diaktualisasikan dalam lanskap digital modern.

Pada awal era digital, respons NU dan lembaga-lembaga keagamaan tradisional lainnya terhadap ruang siber cenderung bersifat defensif. Mereka primarily bereaksi terhadap narasi ekstremis atau hoaks yang telah beredar, seringkali dalam posisi "mengejar ketertinggalan". Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran strategis yang signifikan dari postur defensif menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan ofensif dalam arti membentuk dan memimpin narasi.

Evolusi ini ditandai dengan pembentukan dan penguatan platform-platform digital yang didedikasikan untuk menyebarkan wacana Aswaja. Inisiatif seperti "Cyber ASWAJA An-Nahdliyah" dan proliferasi akun-akun media sosial yang dikelola secara profesional oleh lembaga, badan otonom, dan pesantren di bawah naungan NU adalah manifestasi dari strategi ini [10]. Tujuannya tidak lagi hanya untuk membantah disinformasi, tetapi untuk secara aktif membanjiri ruang digital dengan konten yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan pemahaman Islam yang moderat, sehingga menciptakan narasi tandingan yang kuat dan menarik.

Kunci dari strategi proaktif ini adalah pemahaman yang mendalam tentang audiens target, yaitu generasi milenial dan Gen Z. NU menyadari bahwa metode dakwah tradisional seperti ceramah panjang di mimbar memiliki efektivitas yang terbatas di kalangan anak muda yang terbiasa dengan konten digital yang cepat, visual, dan

interaktif. Oleh karena itu, terjadi proses "apropriasi media", di mana format-format digital baru diadopsi untuk menyampaikan pesan-pesan tradisional.

Contoh nyata dari hal ini adalah praktik pengajian *kitab kuning* (teks-teks Islam klasik) yang disiarkan secara langsung (*live-streaming*) melalui platform seperti YouTube dan Facebook [10]. Ini adalah sebuah inovasi yang brilian: ia mempertahankan substansi keilmuan tradisional yang menjadi ciri khas NU, namun menyajikannya dalam format modern yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja. Selain itu, platform visual seperti Instagram digunakan untuk menyebarkan kutipan-kutipan ulama, infografis tentang prinsip-prinsip Aswaja, dan video-video pendek yang mudah dibagikan. Ini menunjukkan adanya adaptasi sadar terhadap format untuk menyesuaikan dengan kebiasaan konsumsi media audiens target.

Jika dianalisis lebih lanjut, strategi digital NU ini merupakan contoh utama dari "glokalisasi" dakwah. Istilah ini merujuk pada proses di mana fenomena global dalam hal ini, platform media sosial dan tren komunikasi digital diadaptasi untuk melayani tujuan ideologis yang sangat lokal dan spesifik, yaitu pelestarian dan penyebaran *ASWAJA al-Nahdliyah* [10]. Platform yang digunakan seperti YouTube, Instagram, dan Facebook adalah produk teknologi global. Audiens yang ditargetkan, yaitu milenial dan Gen Z, berpartisipasi dalam budaya pemuda global dan tren digital. Namun, konten yang disebarkan sangatlah lokal dan spesifik: ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* menurut mazhab Nahdlatul Ulama (*al-Nahdliyah*). Strategi ini melibatkan adopsi *bentuk* media digital global (seperti *live-streaming* dan estetika media sosial) untuk melestarikan dan mentransmisikan *substansi* lokal yang spesifik. Ini bukanlah sekadar adopsi teknologi yang pasif, melainkan sebuah strategi budaya dan keagamaan yang canggih yang bertujuan untuk memastikan bahwa tradisi lokal tidak tergerus oleh budaya digital yang terglobalisasi, tetapi justru diperkuat melaluinya.

Studi kasus yang paling menonjol dari strategi adaptif NU adalah upaya integrasi terhadap figur-figur dari gerakan "hijrah". Gerakan hijrah adalah sebuah fenomena subkultur pemuda urban yang populer, yang menekankan peningkatan kesalehan pribadi. Meskipun seringkali positif, beberapa segmen dari gerakan ini rentan terhadap pengaruh ideologi puritan atau transnasional yang tidak selalu sejalan dengan Aswaja.

Langkah strategis NU dalam merangkul Hanan Attaki, seorang penceramah milenial yang sangat populer dan pendiri gerakan pemuda "Shift", adalah sebuah manuver yang signifikan. Prosesi *baiat* (sumpah setia) Hanan Attaki kepada NU pada Mei 2023 dianalisis

sebagai upaya sadar untuk menjembatani kesenjangan antara citra tradisional NU dan subkultur hijrah yang trendi dan modern.¹⁴ Dengan membawa figur seperti Hanan Attaki ke dalam barisannya, NU berupaya untuk mengubah persepsi dari "kuno" dan "tradisional" menjadi lebih menarik dan relevan bagi generasi yang mungkin merasa teralienasi dari institusi keagamaan mapan. Ini adalah bentuk kooptasi cerdas: alih-alih memusuhi fenomena populer, NU berupaya untuk mengarahkannya dari dalam, menanamkan nilai-nilai Aswaja ke dalam gerakan yang sudah memiliki audiens yang besar.

Meskipun upaya-upaya NU patut diacungi jempol, penting untuk memberikan perspektif yang kritis dan seimbang. Strategi digital ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Pertama, mereka harus bersaing dalam "pasar ide" digital yang sangat ramai. Gerakan-gerakan transnasional, seringkali dengan pendanaan yang lebih besar, mampu memproduksi konten dengan nilai produksi yang tinggi dan daya tarik populis yang kuat, yang sulit ditandingi oleh inisiatif-inisiatif yang lebih berbasis komunitas.

Kedua, volume dan kecepatan disinformasi seringkali luar biasa. Upaya untuk menyebarkan narasi tandingan yang moderat dan bernuansa dapat dengan mudah tenggelam oleh gelombang hoaks dan propaganda yang dirancang untuk menjadi viral. Ketiga, terdapat tantangan internal yang signifikan. Tidak semua kiai atau ulama tradisional memiliki keterampilan atau bahkan minat untuk terlibat di ruang digital. Terdapat kesenjangan digital dan generasi di dalam tubuh NU sendiri, antara kader-kader muda yang melek digital dan generasi tua yang menjadi penjaga tradisi keilmuan. Menjembatani kesenjangan ini dan membekali para penceramah dengan keterampilan yang diperlukan untuk berdakwah secara efektif di era digital adalah sebuah pekerjaan rumah yang besar.

4. Relevansi Kultural, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan

Analisis konseptual dan studi kasus implementasi kerangka etika siber Aswaja menunjukkan potensinya yang besar, namun juga menyoroti berbagai tantangan yang kompleks. Bagian ini akan mendiskusikan keunggulan, keterbatasan, dan implikasi kebijakan dari penerapan model ini.

Salah satu argumen utama yang mendukung kerangka etika siber berbasis Aswaja adalah keunggulannya dalam hal resonansi kultural. Program literasi media sekuler, meskipun bermanfaat, seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang "asing" atau sekadar seperangkat keterampilan teknis. Sebaliknya, kerangka Aswaja berakar pada

pandangan dunia (*weltanschauung*) religius dan budaya yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Dengan membingkai perilaku digital yang etis bukan sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai kewajiban moral dan bagian dari praktik keagamaan (*'amal shalih*), pendekatan ini memiliki potensi untuk diinternalisasi secara lebih mendalam. Konsep seperti *tabayyun* (verifikasi) tidak lagi hanya soal "memeriksa fakta", tetapi menjadi sebuah tindakan untuk menghindari fitnah, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Menahan diri dari ujaran kebencian bukan lagi sekadar soal "sopan santun di internet", tetapi merupakan implementasi dari prinsip *Tasamuh* dan menjaga persaudaraan (*ukhuwah*) [13]. Framing moral dan religius ini dapat memberikan motivasi yang lebih kuat bagi individu untuk mematuhi norma-norma etis, karena terkait langsung dengan identitas dan keyakinan mereka yang paling mendasar.

Meskipun memiliki keunggulan konseptual, implementasi kerangka etika siber Aswaja dihadapkan pada tantangan yang bersifat sistemik dan struktural.

- a. Skala dan Kecepatan Industri Disinformasi: Kerangka Aswaja pada dasarnya adalah pendekatan yang berfokus pada pendidikan dan pembentukan karakter individu. Namun, masalah disinformasi di Indonesia seringkali tidak bersifat individual, melainkan industrial. Kampanye disinformasi seringkali dijalankan oleh "pasukan siber" atau "buzzer" yang terorganisir dan didanai dengan baik, baik untuk tujuan politik maupun komersial [14]. Mereka mampu memproduksi dan menyebarkan konten palsu dalam skala masif dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pendekatan pendidikan etis, meskipun penting, mungkin tidak cukup cepat atau kuat untuk membendung gelombang disinformasi yang diproduksi secara industrial.
- b. Arus Balik Algoritmik: Terdapat pertentangan fundamental antara nilai-nilai yang dipromosikan oleh kerangka Aswaja dan logika yang mendasari platform media sosial. Aswaja mendorong moderasi, keseimbangan, dan dialog yang bernuansa. Sebaliknya, algoritma platform, yang dioptimalkan untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan pengguna, secara inheren lebih menyukai konten yang ekstrem, emosional, dan memecah belah karena konten semacam itu terbukti menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi.⁵ Ini berarti bahwa setiap individu yang mencoba mempraktikkan etika siber Aswaja pada dasarnya "berenang melawan arus" teknologi yang sangat kuat

yang terus-menerus mendorong mereka ke arah yang berlawanan.

- c. Keberagaman Internal dan Kontestasi: Komunitas Aswaja sendiri bukanlah entitas yang monolitik. Meskipun terikat oleh prinsip-prinsip teologis yang sama, terdapat keragaman pandangan, terutama ketika menyangkut isu-isu politik. Dalam situasi polarisasi politik yang tajam, afiliasi politik terkadang dapat mengesampingkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etis. Akan selalu ada tantangan dan perdebatan internal dalam menerapkan prinsip-prinsip seperti *Tasamuh* (toleransi) atau *I'tidal* (keadilan) secara konsisten, terutama ketika berhadapan dengan lawan politik [15].

Mengingat potensi dan tantangannya, analisis ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan:

- a. Bagi Pendidik: Kerangka etika siber Aswaja, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2, harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di semua tingkatan, mulai dari madrasah ibtdaiyah hingga perguruan tinggi [13]. Tujuannya adalah untuk membekali siswa tidak hanya dengan pengetahuan agama, tetapi juga dengan kompas moral yang dapat mereka gunakan untuk menavigasi kehidupan digital mereka. Materi ajar harus melampaui hafalan dalil dan bergerak menuju studi kasus dan simulasi yang relevan dengan pengalaman daring siswa.
- b. Bagi Pemimpin Agama: Para ulama, kiai, dan penceramah (*da'i*) memegang peran krusial. Mereka memerlukan pelatihan tidak hanya dalam hal penggunaan alat-alat digital, tetapi yang lebih penting, dalam cara mengajarkan prinsip-prinsip etika ini secara efektif kepada jemaah mereka. Khotbah Jumat, pengajian, dan konten-konten dakwah digital harus secara konsisten mengangkat tema-tema etika siber, menerjemahkan konsep-konsep klasik seperti *Tawassuth* dan *Tawazun* ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan tantangan sehari-hari yang dihadapi masyarakat.
- c. Bagi Pemerintah (Kominfo & Kementerian Agama): Kebijakan literasi digital nasional harus bergerak melampaui pendekatan teknis semata. Pemerintah perlu berkolaborasi secara erat dengan organisasi keagamaan arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengembangkan dan menyebarkan materi literasi digital yang menggabungkan kerangka etis yang beresonansi secara kultural. Kampanye nasional harus beralih dari sekadar

"cara mengenali hoaks" menjadi "mengapa menyebarkan hoaks bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas bangsa". Sinergi antara keahlian teknis pemerintah dan legitimasi moral organisasi keagamaan dapat menciptakan pendekatan yang jauh lebih holistik dan efektif.

C. KESIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji secara mendalam paradoks digitalisasi di Indonesia, di mana peningkatan konektivitas diiringi dengan eskalasi infodemik yang mengancam harmoni sosial. Analisis menunjukkan bahwa meskipun inisiatif literasi digital sekuler memiliki peran, mereka seringkali tidak memiliki daya cengkeram kultural yang diperlukan untuk mengubah perilaku secara fundamental. Sebagai alternatif, penelitian ini mengajukan sebuah kerangka "Etika Siber Aswaja" yang dioperasionalkan dari empat pilar fundamental *Ahlussunnah wal Jamaah: Tawassuth* (moderasi) sebagai penangkal ekstremisme algoritmik, *Tasamuh* (toleransi) sebagai landasan dialog sipil, *Tawazun* (keseimbangan) sebagai jalan menuju kesejahteraan digital, dan *I'tidal* (keadilan/keteguhan) sebagai fondasi literasi digital kritis. Studi kasus mengenai strategi dakwah digital Nahdlatul Ulama menunjukkan adanya upaya nyata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam menghadapi tantangan era milenial.

Kontribusi utama dari makalah ini adalah upaya sistematis untuk menjembatani jurang antara teologi Islam klasik dan tantangan etika kontemporer di ruang siber. Alih-alih memperlakukan Aswaja sebagai doktrin yang statis, penelitian ini mengartikulasikannya sebagai *manhaj al-fikr* sebuah metodologi berpikir yang dinamis dan adaptif. Dengan mengoperasionalkan prinsip-prinsip klasik menjadi pedoman perilaku digital yang konkret dan dapat ditindaklanjuti, artikel ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang tertanam secara kultural, relevan secara teologis, dan praktis untuk diterapkan, yang dapat memperkaya diskursus tentang etika digital baik di Indonesia maupun di dunia Muslim yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Pebriyani, "Hasil Survei APJII : Pengguna Internet di Indonesia Tembus 221 Juta, Mendominasi Gen Z," Komunikasi Komunitas Telematika. [Online]. Available: <https://www.komite.id/2024/02/06/hasil-survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-221-juta-mendominasi-gen-z/>
- [2] S. Shabrina, "APJII Rilis Data Terbaru 2025: Pengguna Internet di Indonesia Capai 229 Juta Jiwa," Teknologi. [Online]. Available: <https://teknologi.id/teknologi/apjii-rilis-data-terbaru-2025-pengguna-internet-di-indonesia-capai-229-juta-jiwa>

- [3] M. 'Ulyan, "Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era," *Sinergi Int. J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 3, pp. 100–113, Nov. 2023, doi: 10.61194/ijis.v1i3.591.
- [4] E. Effendi, "User behaviour and hoax information on social media case of Indonesia," *J. Stud. Komun. (Indonesian J. Commun. Stud.)*, vol. 7, no. 3, pp. 930–943, Nov. 2023, doi: 10.25139/jsk.v7i3.7402.
- [5] F. A. Putra, M. Y. Samad, and Mulyadi, "Optimising 'Lambe Hoaks' Digital Literacy to Strengthen National Resilience Against Hoaxes," *J. Lemhannas RI*, vol. 12, no. 2, pp. 157–202, Dec. 2024, doi: 10.55960/jlri.v12i2.599.
- [6] D. Subekti, M. Yusuf, M. Saadah, and M. Wahid, "Social media and disinformation for candidates: the evidence in the 2024 Indonesian presidential election," *Front. Polit. Sci.*, vol. 7, Jul. 2025, doi: 10.3389/fpos.2025.1625535.
- [7] D. A. Triantoro, "Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja," *J. Komun.*, vol. 13, no. 2, pp. 135–150, Apr. 2019, doi: 10.20885/komunikasi.vol13.iss2.art2.
- [8] I. Syahputra, W. Fajar Riyanto, F. Dian Pratiwi, and R. Lusri Virga, "Escaping social media: the end of netizen's political polarization between Islamists and nationalists in Indonesia?," *Media Asia*, vol. 51, no. 1, pp. 62–80, Jan. 2024, doi: 10.1080/01296612.2023.2246726.
- [9] N. J. Rachimoallah, Muhammad Lubis, Putri Handayani Utimadini, "Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media's Impact on Political Development," *J. Middle East Islam. Stud.*, vol. 11, no. 2, pp. 1–21, Oct. 2024, doi: 10.7454/meis.v11i2.177.
- [10] U. Hasanah, K. Anam, and M. Muassomah, "Modernising tradition: Reinforcing ASWAJA al-Nahdhiyah authority among millennials in Indonesia," *HTS Teol. Stud. / Theol. Stud.*, vol. 80, no. 1, pp. 1–9, Apr. 2024, doi: 10.4102/hts.v80i1.9425.
- [11] W. Saputro, A. R. Muzakki, and N. Mubin, "Membumikan Nilai – Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah Annahdliyah Di Era Generasi Z (Gen Z)," *MERDEKA J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 6, pp. 811–815, 2025, doi: 10.62017/merdeka.v2i6.5426.
- [12] A. M. Aziz and A. Kuswanto, "Penerapan Nilai-Nilai Aswaja sebagai Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter Mahasiswa," *Nusant. Educ. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 59–64, Aug. 2024, doi: 10.55732/ner.v2i2.1331.
- [13] S. Zuhri, "Improving The Quality Of Madrasah Ibtidaiyah Through Religious Moderation Approach: A Study Of Basic Education Literature In Indonesia," *Int. J. Teach.*, vol. 2, no. 1, pp. 80–86, Mar. 2025, doi: 10.61798/ijt.v2i1.281.
- [14] I. Yilmaz, W. Triwibowo, H. Bachtiar, and G. Barton, "Competing Populisms, Digital Technologies and the 2024 Elections in Indonesia," Brussels, Jan. 2024. doi: 10.55271/pp0029.
- [15] M. Maemonah, H. Zuhri, M. Masturin, A. Syafii, and H. Aziz, "Contestation of Islamic educational institutions in Indonesia: Content analysis on social media," *Cogent Educ.*, vol. 10, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1080/2331186X.2022.2164019.